

## DETERMINAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Rita Diana Putri<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
57169

e-mail: [1ritadiana258@gmail.com](mailto:ritadiana258@gmail.com) [2mujiyati@ums.ac.id](mailto:mujiyati@ums.ac.id)

### Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapasitas aparatur desa, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan di 19 desa se-Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 57 orang yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, Kapasitas aparatur desa, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapasitas aparatur desa, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), partisipasi masyarakat, akuntabilitas.

### Abstract

*Accountability in the management of village funds is the responsibility of the village government to the community related to the management of village funds. This study aims to obtain empirical evidence on effect of the presentation of financial statements, accessibility of financial statements, quality of supervision of BPD, Government Internal Control System, capacity of village apparatus, Village Financial System, and community participation in accountability in village fund management. The research uses quantitative research methods by testing hypotheses. This research was conducted in 19 villages in Kebonagung Sub-district, Pacitan Regency. The respondents in this study as many as 57 people were determined using purposive sampling method. Data collection uses questionnaires and hypothesis testing using multiple linear regression analysis with SPSS applications. The results showed that the presentation of financial statements, accessibility of financial statements, quality of supervision of BPD, Capacity of village apparatus, Village Financial System (Siskeudes) and community participation had no effect on the accountability of village fund management while the Government Internal Control System influenced the accountability of village fund management.*

**Keywords:** presentation of financial statements, accessibility of financial statements, quality of supervision of BPD, Government Internal Control System, capacity of village apparatus, Village Financial System, community participation, accountability.

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban dari pihak yang berkewajiban yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Dewi & Priyo Hari Adi, 2019). Akuntabilitas dalam perangkat desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Permendagri No. 113, 2014)

Akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Suwarjeni, 2015). Asas akuntabilitas menetapkan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan dalam penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara. Menurut (Nisya, 2017) dalam Halim (2007: 254), akuntabilitas dapat dibagi menjadi tiga yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural.

Penyajian laporan keuangan mengenai dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan komponen yang sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, karakteristik yang dibutuhkan agar laporan keuangan memenuhi kualitas dan tujuan adalah relevan, reliabel, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami serta penyajian laporan keuangan dapat dikatakan memenuhi akuntabilitas jika laporan keuangan tersebut dapat menyajikan sesuai dan secara umum menerima standar akuntansi dan memenuhi laporan keuangan yang kualitatif (Achyani, 2019).

Hasil penelitian dari Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansinya, karena jika suatu SKPD membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang ingin mengakses laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat. Hasil penelitian Bandariy (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sande, 2013) dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan dapat diartikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang diinginkan. Masyarakat berhak atas informasi keuangan sebagai konsekuensi dari konsep akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan akses untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada masyarakat. Jika pemerintah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan, maka pemerintah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas (Achyani, 2019). Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan untuk para pengguna laporan keuangan, akan berdampak pada terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tidak

hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan pengawasan saja, tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015), menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Kualitas pengawasan BPD juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. BPD sendiri merupakan aktor politik masyarakat yang dekat dengan tingkat desa yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Kualitas pengawasan diperlukan untuk menjaga dan mengontrol kualitas dengan pengawasan yang teratur sepanjang proses untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas pengawasan BPD menjadi sarana bagi masyarakat desa dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku (Achyani, 2019). Semakin berkualitas pengawasan BPD maka pemerintah desa akan semakin akuntabel.

Hasil penelitian dari (Munti & Fahlevi, 2017) yang dilakukan di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh menunjukkan bahwa kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Atmadja & Saputra, 2018) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah juga berperan dalam terciptanya pengelolaan dana desa yang baik. Pelaksanaan kegiatan dalam suatu pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali dan juga efisien serta efektif, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan di suatu instansi pemerintah dapat menacapai tujuannya (Achyani, 2019). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan juga efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa Rachmawati, 2014) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal dari akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan juga keterandalan.

Kapasitas aparatur desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakatnya serta sumber daya yang dimiliki oleh desa serta baik yang bercirikan demokratis dan juga desentralistis (Indrinasari 2017). Sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, dimana kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Kewenangan atau tugas dari masing-masing aparatur desa khususnya dalam

bidang pengelolaan keuangan desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa yang memiliki kewenangan di dalam pengelolaan keuangan APBDesa. Sedangkan sekertaris desa mempunyai tugas sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa terkait pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan baik itu penerimaan maupun pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Melihat kewenangan serta tugas dari aparatur desa, maka aparatur desa sebagai kepanjangan tangan negara di dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa dibutuhkan dalam tercapainya atas tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian (Mada et al., 2017) di Kabupaten Gorontalo yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem keuangan khusus bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi teknologi informasi berupa aplikasi yang memiliki konsep akuntabilitas dalam akuntansi keuangan desa. Dengan satu input transaksi maka dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan memanfaatkan teknologi, proses pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Achyani, 2019).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana mungkin serta ramah pengguna dan juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Sistem teknologi yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Jika semakin mudah digunakan, maka individu tersebut akan semakin percaya bahwa sistem teknologi tersebut sangatlah bermanfaat. Hasil penelitian dari (Juardi, 2018) menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mada et al., 2017).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan serta pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Masyarakat sebagai lingkungan terdekat dari pemerintah desa yang merupakan subjek strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa Isbandi (2007: 27). Dalam penelitian Windarnawati (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang tinggi. Hasil penelitian dari (Mada et al., 2017) menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas aparatur desa, sistem keuangan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Determinan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data kuesioner yang diperoleh dari respon tertulis dari responden berkaitan dengan butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan yang dikolaborasi dari masing-masing indikator pada setiap variabel dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari aparatur desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa atau kaur keuangan pada kantor kepala desa yang ada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Populasi dalam penelitian ini adalah informan yang dapat dipercaya memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi: Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara atau Kaur Keuangan, yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah desa se- Kecamatan Keboangung yaitu ada di sembilan belas desa dengan tiga responden pada setiap kantor desanya. Sampel dalam penelitian ini terdapat 57 perangkat desa.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa se-kecamatan Kebonagung kabupaten Pacitan
2. Responden yang diambil yaitu kepala desa, sekretaris, dan bendahara
3. Responden menjabat minimal satu tahun

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang mewakili kriteria yang menjadi variabel bebas dan terikat. Variabel-variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen kuisisioner yang berisi beberapa pernyataan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari penelitian sebelumnya dengan mengacu pada variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing variabel tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala Likert 1-5. Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 yang menunjukkan penilaian/pendapat sangat setuju (SS).

Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Analisis yang meliputi:

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range* (Ghozali, 2011:19).

Deskripsi data penelitian ini meliputi hasil jawaban responden dari instrumen penelitian ini yang telah disebarakan sebelumnya. Sedangkan deskripsi data responden meliputi jenis kelamin, usia, masa kerja sebagai aparatur desa, pendidikan terakhir, jabatan fungsional dan juga lamanya berada pada posisi dan jabatan fungsionalnya.

Deskripsi responden penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Gambaran yang diberikan berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja sebagai perangkat desa. Deskripsi responden digunakan untuk mengetahui kumpulan data yang bisa mewakili sampel atau populasi dari setiap demografi responden yang bersangkutan.

### 2. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang telah dikumpulkan atau telah digunakan untuk mengetahui butir yang valid dan butir yang tidak valid (gugur). Setelah menentukan sampel yang diambil dalam penelitian, maka sangatlah penting untuk melakukan uji kualitas data. Terdapat dua macam uji kualitas data, yaitu:

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Data akan valid jika data yang dilaporkan oleh peneliti sama dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Uji validitas dihitung menggunakan teknik korelasi dengan rumus *Person Product Moment* dengan menggunakan bantuan dari SPSS. Hasil perhitungan nantinya diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi pada taraf signifikansi 5%. Apabila hasil dari perhitungan korelasi *Person Product Moment* hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator tersebut dapat dinyatakan valid.

#### b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuisioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden terhadap kuisioner konsisten atau stabil. Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Menurut Ghozali (2011:47) untuk menguji tingkat reabilitas instrumen dilakukan menggunakan Koefisien Reabilitas (*Alpha Cronbach*). Nilai Koefisien *Alpha Cronbach* dikatakan baik apabila koefisien tersebut bernilai 0,6 sampai 1,0.

#### c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian sebelum melakukan uji hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Regresi yang baik merupakan data dengan distribusi normal, bebas multikolinearitas, bebas heteroskedastisitas, serta tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa pengujian yaitu:

##### 1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi gangguan ataupun residual mempunyai retribusi normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dianggap berdistribusi normal, maka ada masalah yang terdapat dalam asumsi normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini

menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov (K-S)*. Pengambilan keputusan pada uji *K-S* adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas ataupun signifikansi  $> 0,05$ , maka data terdistribusi normal
- b) Jika nilai probabilitas ataupun signifikansi  $< 0,05$ , maka data terdistribusi tidak normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2011:105) untuk mendeteksi ada ataupun tidaknya multikolinieritas didalam regresi dapat diketahui dengan melihat *VIF (Variance Inflation Factors)* dan *tolerance*. Kriteria riset ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *VIF*  $< 10$  serta *tolerance value*  $> 0,10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- b) Jika nilai *VIF*  $> 10$  serta *tolerance value*  $< 0,10$ , maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas.

## 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut sebagai homokedastisitas, sebaliknya jika menunjukkan hasil yang berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011:139) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Kriteria pada riset ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi  $> 0.05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi  $< 0.05$ , maka terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut RD, W & S (2015) adanya potensi korelasi yang tinggi diantara variabel independen secara terpisah sehingga terdapat dua model penelitian yang diuji masing-masing variabel independen, yaitu:

$$APADD = \alpha + \beta_1 PLK + \beta_2 ALK + \beta_3 KPBD + \beta_4 SPIP + \beta_5 KAD + \beta_6 SKD + \beta_7 PM + e$$

Keterangan:

APDD	: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
PLK	: Penyajian Laporan Keuangan
ALK	: Aksesibilitas Laporan Keuangan
KPBD	: Kualitas Pengawasan BPD
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
KAD	: Kapasitas Aparatur Desa
SKD	: Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
PM	: Partisipasi Masyarakat
<i>e</i>	: Error

### b. Uji Statistik (Uji F)

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan nilai probabilitas signifikansi dengan tingkat  $\alpha = 0.05$ . Kriteria pengujian menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi  $< 0.05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y serta model yang dipakai *fit of goodness*.
- 2) Jika tingkat signifikansi  $> 0.05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y serta model yang dipakai tidak *fit of goodness*.

### c. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011:98) uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- 1) Hipotesis yang dipakai adalah:
  - a)  $H_0: \beta_1 = 0; \beta_2 = 0; \beta_3 = 0$ , maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
  - b)  $H_a: \beta_1 \neq 0; \beta_2 \neq 0; \beta_3 \neq 0$ , maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen ( $H_0$  diterima).
  - b) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen ( $H_0$  ditolak)
- 3) Kriteria pengujian
  - a) Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
  - b) Apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan *adjusted*  $R^2$ , nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1, yang mana jika nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai  $R^2$  makin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil analisis yang telah dilakukan sudah memenuhi uji persyaratan dari analisis regresi linier berganda. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas sehingga dapat melanjutkan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Regresi	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	Keterangan
Konstanta	4,903	0,736	2,001	0,465	
PLK	0,002	0,022	2,001	0,983	H <sub>1</sub> ditolak
ALK	0,401	1,456	2,001	0,152	H <sub>2</sub> ditolak
KP. BPD	0,280	0,981	2,001	0,331	H <sub>3</sub> ditolak
SPIP	0,496	2,342	2,001	0,023	H <sub>4</sub> diterima
KAD	-0,127	-0,546	2,001	0,587	H <sub>5</sub> ditolak
SKD	0,182	0,999	2,001	0,323	H <sub>6</sub> ditolak
PM	0,144	0,780	2,001	0,439	H <sub>7</sub> ditolak

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Dari Tabel 1 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = 4,903 + 0,002PLK + 0,401ALK + 0,280KP.BPD + 0,496SPIP - 0,127KAD + 0,182SKD + 0,144PM$$

### Uji F

**Tabel 2. Hasil Uji F**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	500.046	7	71.435	12.709	.000 <sup>b</sup>
Residual	275.428	49	5.621		
Total	775.474	56			

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Uji signifikansi simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau keseluruhan terdapat variabel dependen. Berdasarkan Tabel 2 diatas adalah tabel anova yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,709, sehingga lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,20 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ), sehingga hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara bersama-sama variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas paratur desa, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 3. Hasil Uji  $R^2$**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.594	2.371

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) selain digunakan untuk menguji kemampuan dari setiap variabel independen dalam menerangkan variabel dependen juga digunakan untuk mengetahui suatu tingkat ketepatan yang paling dalam analisis regresi dimana yang telah ditunjukkan oleh besarnya suatu koefisien determinasi antara 0 dengan 1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam tabel 2, telah didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,645 atau 64,5%. hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dijelaskan oleh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas aparatur desa, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian.

## Pembahasan

### Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,401. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (0,022) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan ada atau tidaknya penyajian laporan keuangan, tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dalam desa, dengan demikian **H1 ditolak** yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Laporan keuangan belum bisa dijadikan acuan yang mendasar di dalam pengambilan keputusan ataupun evaluasi pemerintah desa dan juga belum menjadi tanggung jawab publik.

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah pernyataan tentang realisasi dalam penyusunan anggaran desa, kekayaan desa, program pemerintah desa, dan dan juga program pemerintah daerah serta program yang lainnya (Achyani, 2019). Penyajian laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan belum efektif untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan prediksi sumber daya yang dibutuhkan.

Hal ini juga sejalan dengan dalam penelitian yang dilakukan (Sari, 2017) yang menyatakan bahwa adanya permasalahan pada penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang masih belum memenuhi kriteria penyusunan laporan yang benar, sehingga hal ini yang menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,002. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (1,456) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan ada atau tidaknya aksesibilitas laporan keuangan, tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dalam desa, dengan demikian **H2 ditolak** yang

menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dirasa masih sulit. Laporan keuangan tidak dapat ditemukan dengan mudah, masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut dan ikut mengontrol dalam pengelolaan dana desa karena tidak semua data dapat diakses ataupun disajikan untuk masyarakat umum. Mayoritas pemerintah desa masih menggunakan media konvensional untuk memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan melalui papan pengumuman dan spanduk (MMT). Akses media tersebut biasanya juga terbatas di tempat dan hanya kantor desa tertentu. Hal ini dapat dilihat dari fenomena publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi pemerintah desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2017) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel kualitas pengawasan BPD menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,280. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (0,981) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan ada atau tidaknya kualitas pengawasan BPD, tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan demikian **H3 ditolak** yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini faktor-faktor kualitas pengawasan BPD yang meliputi penyusunan jadwal dalam pengawasan, pengawasan sesuai dengan program, pengawasan berdasarkan standar objektif, pengawasan berpedoman pada peraturan, komunikasi yang baik dengan aparatur desa, penilaian atau evaluasi pada pelaksanaan kegiatan dan program desa dalam pengelolaan dana desa dirasa belum dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Faktor yang menjadikan belum efektifnya fungsi kontrol dari BPD sendiri antara lain belum adanya sistem kendali yang terstandarisasi dari BPD dalam pengendalian produktivitas kepala desa, serta perencanaan pengendalian yang tidak berkelanjutan oleh BPD. BPD perlu juga untuk melakukan fungsi kontrol dan pembantuan secara terus menerus dan juga memberikan masukan kepada pemerintah desa melalui rapat rutin, selain itu BPD juga sebaiknya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan aparatur desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Achyani, 2019) yang menunjukkan bahwa kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,496. Berdasarkan uji t (uji hipotesis) menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  (2,342) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0,023. Hal ini berarti taraf dari signifikan  $< 0,05$ . Hal ini berarti apabila

sistem pengendalian intern pemerintah semakin baik dalam pengelolaan dana desa, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan maksimal. Namun, sebaliknya apabila sistem pengendalian manajemen kurang optimal maka, akan sulit untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Artinya bila sistem pengendalian terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang handal dan juga informatif, serta terciptanya pengamanan aset negara dan menjamin ketaatan serta kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Achyani, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan kepercayaan yang memadai terhadap proses penyelenggaraan pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akntabilitas.

### **Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel kapasitas aparatur desa menunjukkan koefisien yang **negatif** sebesar -0,127. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (-0,546) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan bahwa ada tidak adanya kapasitas aparatur desa, tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dalam desa, dengan demikian  $H_5$  yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan (Achyani, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh oleh kemampuan pengurus desa dalam pemahaman, keterampilan, dan kemampuan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, anantara lain kurangnya pendampingan yang efektif dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana desa. Dan juga minim acara seperti pelatihan teknis dan program yang mengarah pada peningkatan kualitas kapasitas aparatur desa juga bisa menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan variabel kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat memahami bagaimana cara mengelola dana desa dengan baik. Peningkatan tersebut meliputi pendampingan intensif di dalam mengelolaa dana desa, aparatur desa turut serta dalam pelatihan pengurus desa untuk meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan pendukung.

### **Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel Sistem Keuangan Desa (siskeudes) menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,182. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (0,999) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan ada atau tidaknya Sistem Keuangan Desa (siskeudes), tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dalam desa, dengan demikian **H6 ditolak** yang menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun sistem keuangan desa dirasa memudahkan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan, namun hal ini ternyata tidak juga menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sendiri. Banyak faktor yang menyebabkannya seperti penggunaan yang belum maksimal, sistem yang terkadang terjadi eror sehingga tidak dapat digunakan. Kelemahan sistem keuangan desa antara lain sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa yang diberikan bagi para pegawai. Sehingga hal ini dapat menjadi faktor mengapa sistem keuangan desa tidak berpengaruh di kecamatan Kebonagung kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amalya, dkk (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat menunjukkan koefisien yang **positif** sebesar 0,182. Hasil ini secara statistik tidak signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  (0,780) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,001) sehingga signifikansi value nya lebih dari 0,05. Dari hasil secara keseluruhan dapat diartikan ada atau tidaknya Sistem Keuangan Desa (siskeudes), tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dalam desa, dengan demikian **H7 ditolak** yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sehubungan antara pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* dengan masyarakat desa sebagai *principal* untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan pada banyak peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan yang dimanakan dalam Undang-undang. Namun partisipasi masyarakat di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan dana desa dirasa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian serta waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masyarakat masih enggan untuk turut serta dalam musyawarah untuk pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa masih jarang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat masih kesulitan dalam memahami anggaran-anggaran desa karena kurangnya sosialisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (B.M & Asmony, T., & Herwati, R, 2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas aparatur desa, sistem keuangan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 57 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas aparatur desa, sistem keuangan desa, dan partisipasi

- masyarakat dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 64,5%, sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara bersama-sama variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem pengendalian intern pemerintah, kapasitas paratur desa, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.
  3. Hasil uji t menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kapasitas paratur desa tidak berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih dari satu kecamatan, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terutama pada saat melakukan penyebaran kuesioner supaya memperhatikan responden dalam tahap mengisi jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam kuesioner, agar jawaban dapat sesuai dengan isi dari pernyataan dan juga tidak terjadi adanya bias data yang mungkin dapat disebabkan oleh jawaban responden.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. (2019). THE DETERMINANT ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol 4, No 2 (2019)*, 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Amalya, T., Akram, & Pituringsih, E. (2017). Determinants Of Village Financial Management And Its Implication Toward Accountability: Study On Village Governance In West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology, Vol.5, No.12*.
- Annisa Rachmawati. (2014). *PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the

- accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1).
- B.M, L., & Asmony, T., & Herwati, R, T. (2020). *Analysis of Factors Affecting Accountability in Village Fund Management in Central Lombok District*. 30, 1886–1899.
- Dewi, D. E., & Priyo Hari Adi. (2019). *TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG*. 03(02), 287–299.
- Juardi, M. M. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV, 84–107.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Nisya, F. K. (2017). *Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mayong Dan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*.
- Permendagri No. 113, 2014). (2014). *(Permendagri No. 113, 2014)*.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2013 - *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Widarnawati, B. W. et al. (2018). Factors Affecting of Village Financial Management and Its Implication for Stakeholders Trust (Studi on Villages in Central Lombok, Indonesia). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3). ISSN: 2348-0386.